



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga



penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok mengatur sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam peraturan tersebut menyatakan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah lembaga teknis daerah berbentuk dinas, merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.



Fungsi dan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis diseminasi informasi dan statistik;
- b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis telematika dan persandian;
- c. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas urusan komunikasi dan informatika;
- d. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan pengelolaan e-Government, informasi dan infrastruktur telematika;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
- g. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokoknya adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

a. Sekretaris, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
- 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Kepegawaian

b. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi :

- 1) Seksi Statistik
- 2) Seksi Persandian

c. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :

- 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi
- 2) Pengembangan Aplikasi



3) Seksi E-Government

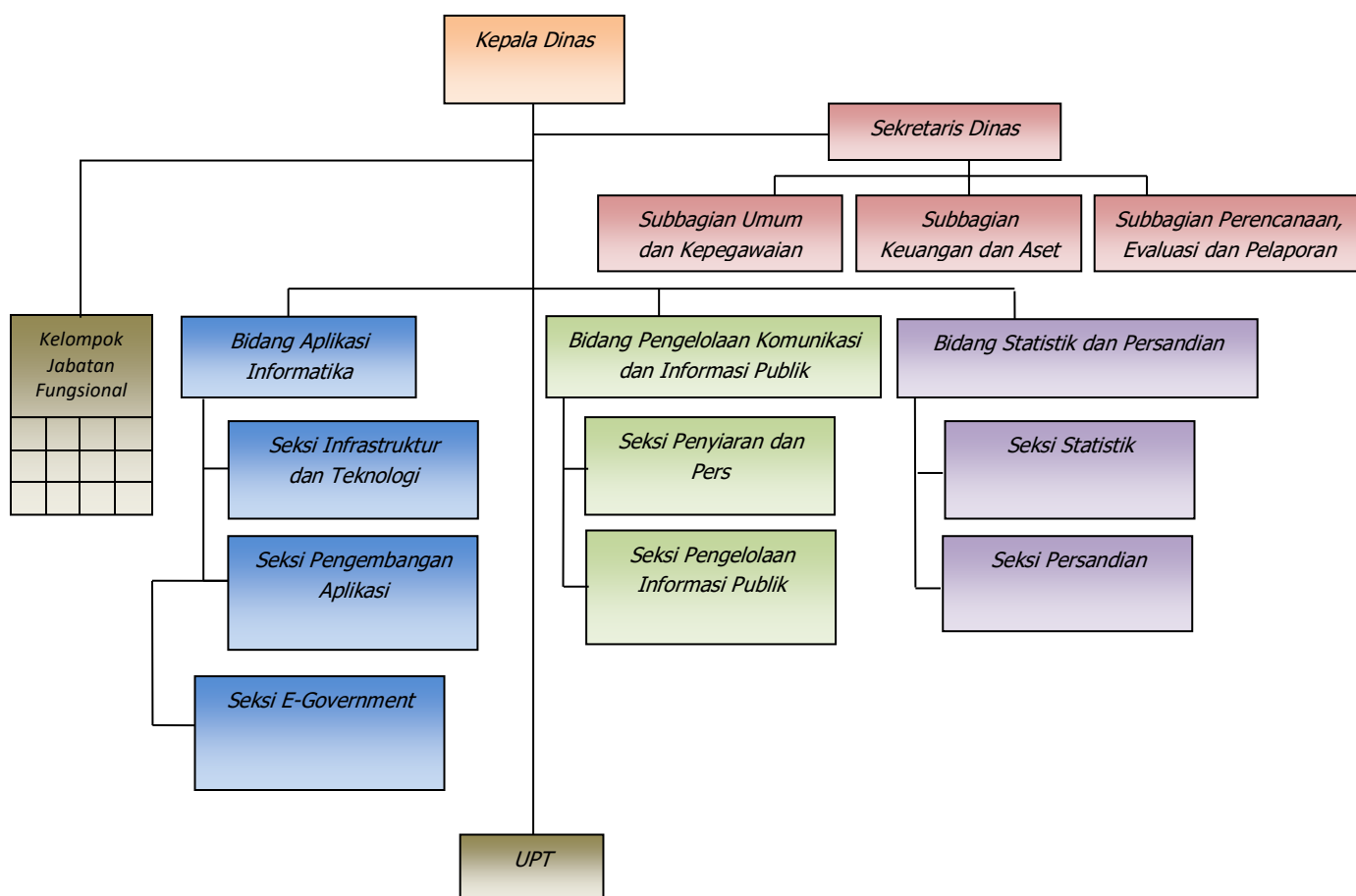
d. Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik,
membawahi:

- 1) Seksi Penyiaran dan Pers
- 2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dapat disajikan pada gambar berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon





Keadaan Pegawai

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki pegawai sebanyak 28 orang Pegawai negeri Sipil. Dari jumlah pegawai sebanyak 28 orang tersebut terdiri dari : Kepala Dinas (Eselon II.b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eseleon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Eselon IV.a) sebanyak 10 orang, dan pelaksana sebanyak 13 orang. Disamping itu terdapat pegawai honorer/ Non PNS sebanyak 25 orang.

TABEL 1.1 KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON JABATAN

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Non PNS	Jumlah
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretaris			1				1
3	Kepala Bidang			3				3
4	Kepala Seksi/ Kasubag				10			10
5	Pelaksana					13		13
6	Non PNS						25	25
	Total		1	4	10	13	25	53

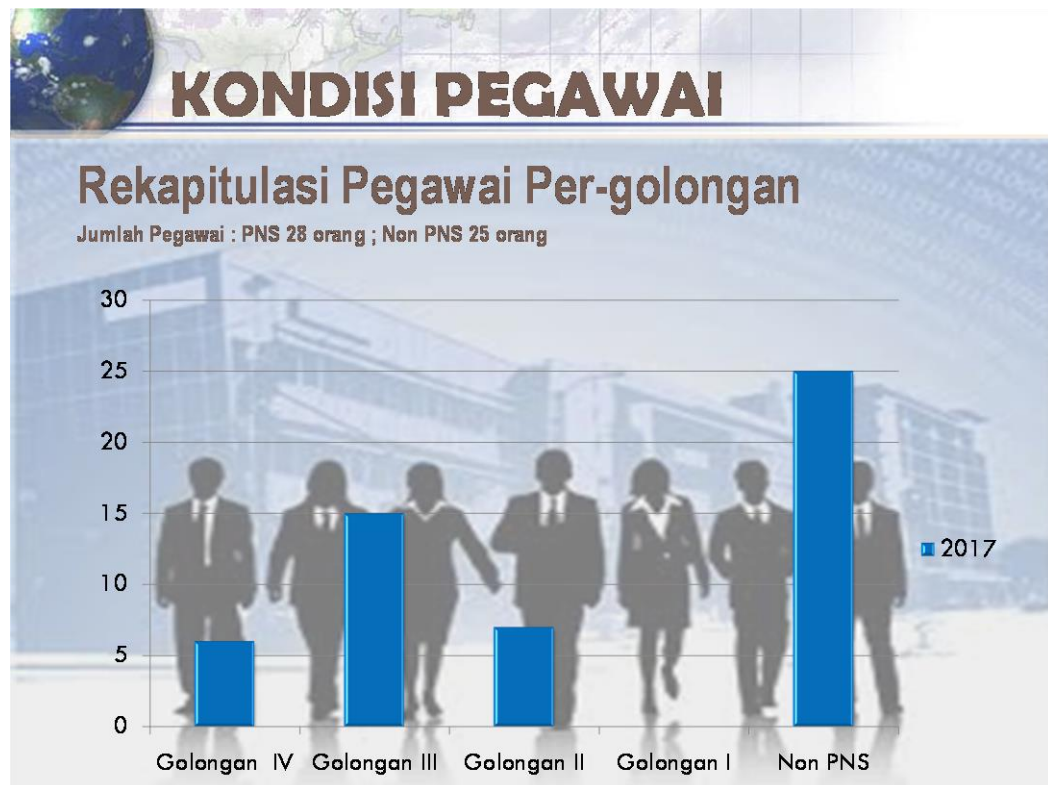
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.2.

TABEL 1.2 KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN GOLONGAN

No	Uraian	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Non PNS	Jumlah
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretaris	1					1
3	Kepala Bidang	3					3
4	Kepala Seksi/ Kasubag	1	9				10
5	Pelaksana		6	7			13
6	Non PNS					25	25
	Total	6	15	7		25	53

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, 2017



Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel 1.3

TABEL 1.3 KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Uraian	S3	S2	S1/D3	SMA	Jumlah
1	Kepala Dinas		1			1
2	Sekretaris		1			1
3	Kepala Bidang		3			3
4	Kepala Seksi/ Kasubag		3	6	1	10
5	Pelaksana			3	10	13
6	Non PNS			11	14	25
Total			8	20	25	53

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, 2017



Pemanfaatan Aset

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana yang ada saat per 31 Desember 2017 adalah pada tabel sebagai berikut :

TABEL 1.4 ASET SKPD

NO.	URAIAN	NILAI ASET 2016	NILAI ASET 2017
1.	TANAH	812.019.550.00	812.019.550.00
2.	PERALATAN DAN MESIN	4.516.720.287.39	5.588.057.094.15
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.967.517.267.03	3.577.706.381.03
4.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.300.366.661.05	2.990.927.530.24
5.	ASET TETAP LAINNYA	72.457.000.00	72.457.000.00
6.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
7.	ASET TIDAK BERWUJUD	727.148.491.76	945.853.491.76
JUMLAH		11.347.554.257.22	13.987.021.047.18

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, 2017



1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
- 2) Instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Permenpan Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.
- 5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
- 6) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5 Isu Strategis

Dalam pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, maka dilakukan strategi untuk mencapai tujuan. Strategi adalah upaya untuk mencapai tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi. Strategi memberikan pengarahannya terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi serta memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Strategi menghubungkan sumber daya

manusia dan sumber daya lainnya dengan tantangan dan resiko yang harus dihadapi dari lingkungan di luar organisasi.

Untuk menghadapi tantangan dan resiko tersebut, strategi dapat disesuaikan dengan faktor-faktor eksternal dan internal yang selalu berubah. Salah satu perumusan strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan analisa *strenghts*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats* (SWOT).

a). Identifikasi Faktor Strategi Internal

Kekuatan (*strenghts*) :

1. Tersedianya sumberdaya aparatur;
2. Tersedianya sarana dan prasarana;
3. Adanya tugas pokok dan fungsi;
4. Adanya komitmen dan kebijakan serta dukungan dari pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat informasi;
5. Adanya jaringan intranet;
6. Adanya jaringan intranet dan internet berbasis Fiber Optik;
7. Adanya jaringan WAN sampai titik Kecamatan dan Kelurahan;
8. SKPD telah memiliki infrastruktur yang memadai;
9. Hampir semua SKPD memiliki perangkat TIK;
10. Tersedianya tenaga Instruktur bidang kerja komunikasi dan informatika.

Kelemahan (*weaknesses*) :

1. Kualitas dan kuantitas aparatur masih rendah/kurang;
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai;
3. Lemah/kurang koordinasi;
4. Adanya kesenjangan digital dan kesenjangan informasi;
5. Belum terpusatnya management data dan server terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Pemanfaatan jaringan intranet dan internet yang belum optimal;
7. Pemanfaatan jaringan WAN di tingkat kecamatan dan kelurahan belum optimal;
8. Belum semua kebijakan tertulis pemanfaatan infrastruktur dalam bentuk SOP;



9. Spesifikasi perangkat TIK yang harus ditingkatkan;
10. Budaya kerja dan penguasaan teknologi komunikasi masih rendah/kurang.

b). Identifikasi Faktor Strategi Eksternal

Peluang (*opportunities*) :

1. Potensi dukungan dan geografis;
2. Dukungan pemerintah dan pemerintah daerah cukup besar;
3. Tersedianya perangkat teknologi komputer (komputer internet);
4. Tersedianya mitra kerja yang handal;
5. Peningkatan akses bagi masyarakat pedesaan melalui Desa Berdering dan Desa Pintar;
6. Pesatnya transaksi elektronik dalam dunia bisnis;
7. Dukungan dari Pemerintah Daerah, baik perangkat keras maupun perangkat lunak;
8. Harga perangkat keras relatif semakin murah dan perangkat lunak mudah ditingkatkan (*upgrade*);
9. Komputer dan internet sudah dianggap sebagai kebutuhan dasar;
10. Kemampuan dan daya guna perangkat keras semakin canggih;
11. Perangkat keras semakin mudah didapatkan dipasaran;
12. Semakin meningkatnya penggunaan internet sehingga informasi lebih mudah tersebar.

Ancaman/tantangan (*threats*) :

1. Krisis ekonomi yang belum pulih;
2. Lemahnya daya saing;
3. Kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*);
4. Tingginya tingkat pengangguran;
5. Adanya kesenjangan digital;
6. Terjadinya *overload traffic internet* (lalu lintas internet yang penuh).
7. Belum adanya regulasi tertulis dari Pemerintah Daerah mengenai *platform* perangkat lunak;
8. Perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak sangat pesat sehingga sebagian besar cepat ketinggalan jaman;



9. Belum banyaknya SDM yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik;
10. Keterbatasan SDM untuk menguasai perangkat keras dan perangkat jaringan;
11. Banyaknya kualitas perangkat keras tidak sesuai dengan keasliannya;
12. Tingkat kesadaran penggunaan internet sehat belum dapat berjalan dengan baik.

TABEL 1.5 INTERNAL STRATEGIK FAKTOR ANALISIS SISTEM

Faktor-Faktor Strategis			
Kekuatan (Strength)		Kelemahan (Weakness)	
1	Tersedianya Sumber Daya Aparatur	1	Kualitas dan kuantitas aparatur masih rendah/kurang
2	Tersedianya sarana dan prasarana	2	Sarana dan prasarana yang belum memadai
3	Adanya tugas pokok dan fungsi	3	Lemah/kurangnya koordinasi
4	Adanya komitmen dan kebijakan serta dukungan dari Pemda dalam mewujudkan masyarakat informasi	4	Adanya kesenjangan digital dan kesenjangan informasi
5	Adanya jaringan Intranet	5	Belum terpusatnya management data dan server secara terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Adanya jaringan intranet dan internet berbasis Fiber Optik	6	Pemanfaatan jaringan internet dan intranet yang belum optimal
7	Adanya jaringan WAN sampai titik Kecamatan	7	Pemanfaatan jaringan WAN di tingkat kecamatan belum optimal
8	SKPD telah memiliki Infrastruktur yang memadai	8	Belum adanya kebijakan tertulis pemanfaatan infrastruktur dalam bentuk SOP
9	Hampir semua SKPD memiliki perangkat TIK	9	Spesifikasi perangkat TIK yang harus ditingkatkan
10	Tersedianya tenaga Instruktur bidang kerja Kominfo	10	Budaya kerja dan penguasaan teknologi komunikasi masih rendah/kurang;

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

TABEL 1.6 EKSTERNAL STRATEGIK FAKTOR ANALISIS SISTEM

Faktor-Faktor Strategis			
Peluang (Opportunities)		Ancaman/Tantangan (Threats)	
1	Potensi pendukung dan geografis	1	Krisis ekonomi yang belum pulih
2	Dukungan Pemerintah dan Pemda cukup besar	2	Lemahnya daya saing
3	Tersedianya perangkat teknologi komputer	3	Kejahatan dunia maya (cyber crime)
4	Tersedianya mitra kerja yang handal (PT.Telkom/Pos/ perguruan tinggi komunikasi/Komputer)	4	Tingginya tingkat pengangguran
5	Peningkatan akses bagi masyarakat perdesaan melalui Desa Berdering dan Desa Pintar	5	Adanya Kesenjangan Digital
6	Pesatnya transaksi elektronik dalam dunia bisnis	6	Terjadinya overload traffic internet (lalu lintas internet yang penuh)
7	Dukungan dari Pemerintah Daerah, baik perangkat keras maupun perangkat lunak	7	Belum adanya regulasi yang tertulis dari Pemerintah Daerah mengenai platform perangkat lunak
8	Harga perangkat keras relatif semakin murah dan perangkat lunak mudah ditingkatkan (upgrade)	8	Perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak sangat pesat sehingga sebagian besar cepat ketinggalan jaman
9	Komputer dan internet sudah dianggap sebagai kebutuhan dasar	9	Belum banyaknya SDM yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik
10	Kemampuan dan daya guna Perangkat keras semakin canggih	10	Keterbatasan SDM untuk menguasai Perangkat keras dan perangkat jaringan
11	Perangkat keras semakin mudah didapatkan dipasaran	11	Banyaknya kualitas Perangkat keras tidak sesuai dengan keasliannya
12	Semakin meningkatnya penggunaan internet sehingga informasi lebih mudah tersebar	12	Tingkat kesadaran penggunaan internet sehat belum dapat berjalan dengan baik

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

1.6 Sistematika Penulisan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengacu pada panduan PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan tentang : Latar Belakang, Tupoksi, Struktur Organisasi, Landasan Hukum, Isu Strategis, dan Sistematika Penulisan.



BAB II . PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini akan menjabarkan tentang : Rencana Strategis Organisasi yang terdiri dari Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran, Cara mencapai tujuan dan sasaran. Pada Bab ini juga menjabarkan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang berisi sasaran, Indikator sasaran dan Program-program 2017

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan menjabarkan tentang: Kerangka Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Kinerja, Perbandingan Data Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Permasalahan dan Solusi.

BAB IV. PENUTUP



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk kurun waktu lima tahun 2014-2019.

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Oleh karena itu, visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tak lepas dari visi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Beriman, Sehat, Cerdas dan Sejahtera".

Penetapan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon disamping harus berlandaskan Tugas Pokok Dinas adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019.

Berdasarkan uraian tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah mengantisipasi dengan menetapkan Visi sebagai berikut.

2.1.1 Visi

Visi meliputi pandangan jauh kedepan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif. Dengan demikian visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan dalam jangka panjang. Mengacu pada konsepsi visi di atas, di samping melihat latar belakang serta fenomena-fenomena yang ada, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon mempunyai keinginan memperbaiki keadaan tersebut dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam rencana strategis ini. Oleh karena itu, visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah :

**"Mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai Pusat
Komunikasi dan Informatika Daerah"**

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon harus mempunyai misi yang jelas. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sehingga dapat terus eksis dan mengikuti irama perkembangan zaman. Dengan misi dapat ditetapkan sasaran utama yang harus dicapai oleh organisasi sehingga tidak ada keraguan bagi segenap komponen organisasi. Demikian juga dengan misi yang telah ditetapkan, organisasi dapat mengkoordinasikan segala tindakan dan usaha-usaha yang



mencapai visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan.

Misi yang telah dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah :

- Misi 1 Menyediakan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika yang memadai.
- Misi 2 Meningkatkan pelayanan informasi dan telekomunikasi.
- Misi 3 Meningkatkan kualitas SDM dalam bidang komunikasi dan informatika
- Misi 4 Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait dan media massa

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan rumusan misi beserta sasaran dan indikator sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut.

TABEL 2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Diskominfo Sebagai Pusat komunikasi dan informatika daerah	Menyediakan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika yang memadai	Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana komunikasi dan informatika yang memadai	Tersedianya prasarana dan sarana komunikasi dan informatika	Prosentase kantor pemerintah yang terhubung jaringan WAN
	Meningkatkan pelayanan informasi dan telekomunikasi	Mewujudkan peningkatan pelayanan informasi dan telekomunikasi	Terwujudnya pelayanan informasi dan telekomunikasi	Jumlah pelayanan publik berbasis IT
				Jumlah website instansi pemerintah daerah
				Jumlah pelayanan publik bidang telekomunikasi dan persandian
				Jumlah dokumen (pedoman) operasional bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Jumlah dokumen data statistik
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
				Nilai LAKIP / AKIP
				Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
				Prosentase tertib administrasi barang/ aset daerah
	Meningkatkan kualitas SDM dalam bidang komunikasi dan informatika	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM dalam bidang komunikasi dan informatika	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah SDM (aparatur dan masyarakat) yang mengikuti pelatihan/bimtek berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait dan media massa	Peningkatan diseminasi dan pendistribusian informasi melalui berbagai media komunikasi serta kemitraan media	Meningkatkan peran lembaga komunikasi dan kemitraan media dalam penyebaran informasi	Jumlah Informasi yang tersampaikan melalui berbagai media

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Permenpan Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebanyak 12 Indikator sebagai berikut.

TABEL 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator Kinerja Utama
1.	Tersedianya prasarana dan sarana komunikasi dan informatika	Prosentase kantor pemerintah yang terhubung jaringan WAN	(jumlah kantor pemerintah yang terhubung WAN yang telah diselesaikan)/ (jumlah Target tahunan kantor pemerintah yang terhubung WAN yang harus diselesaikan) x 100 %
2.	Terwujudnya pelayanan pelayanan informasi dan telekomunikasi	Jumlah pelayanan publik berbasis IT	Jumlah pelayanan publik berbasis IT yang telah diselesaikan dalam satu tahun
		Jumlah website instansi pemerintah daerah	Jumlah website instansi pemerintah daerah yang telah diselesaikan dalam satu tahun
		Jumlah penyelenggaraan bidang telekomunikasi dan persandian	Jumlah penyelenggaraan bidang telekomunikasi dan persandian yang telah diselesaikan dalam satu tahun
		Jumlah dokumen (pedoman) operasional bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah dokumen / pedoman operasional bidang TIK yang telah diselesaikan dalam satu tahun
		Jumlah dokumen data statistic	Jumlah dokumen data statistik yang telah diselesaikan dalam satu tahun
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi dan telekomunikasi
		Nilai LAKIP / AKIP	Hasil evaluasi dan penilaian dari Inspektorat
		Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	LHP BPK / Inspektorat
		Prosentase tertib administrasi barang/ aset daerah	Laporan Aset Daerah
3.	Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah SDM (aparatur dan masyarakat) yang mengikuti pelatihan/bimtek berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan/bimtek berbasis TIK dalam satu tahun
4.	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga terkait dan media massa	Jumlah Informasi yang tersampaikan melalui berbagai media	Jumlah informasi yang telah tersampaikan dalam satu tahun

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017



2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan janji instansi pemerintah untuk mencapai suatu kinerja tertentu dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, yaitu berupa hasil atau manfaat. Kewajiban untuk menyusun penetapan kinerja ini diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 butir ketiga dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan SE MENPAN Nomor 31 Tahun 2004 dan terakhir telah diperbaharui dengan Peraturan MENPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa penetapan kinerja dibuat secara berjenjang mulai dari eselon I atau SKPD sampai ke pimpinan instansi atau kepala daerah. Batas waktu penyampaian Perjanjian kinerja paling lambat adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, indikator ini ditetapkan untuk menilai keefektifan pencapaian sasaran-sasaran instansi pemerintah dalam memberikan hasil dan manfaat terutama bagi masyarakat.

Perjanjian kinerja merupakan kumpulan dari beberapa sasaran strategis, dan setiap sasaran strategis dirumuskan indikator kinerja serta target yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja ini ditetapkan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan pada tahun anggaran bersangkutan.

Adapun Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2017 disajikan pada berikut ini :



TABEL 2.3 PERJANIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Tersedianya prasarana dan sarana komunikasi dan informatika	Prosentase kantor pemerintah yang terhubung jaringan WAN	%	92	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.550.164.400
2.	Terwujudnya pelayanan informasi dan telekomunikasi	Jumlah pelayanan publik berbasis IT	Jenis	4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.550.164.400
		Jumlah website instansi pemerintah daerah	SKPD	52	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.550.164.400
		Jumlah penyelenggaraan bidang telekomunikasi dan persandian	Jenis	5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.550.164.400
		Jumlah dokumen (pedoman) operasional bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kajian/Regulasi	3	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.550.164.400
					Program Pengkajian dan Penelitian bidang Komunikasi dan Informasi	53.995.000
		Jumlah dokumen data statistik	Dok	1	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	239.885.100
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	NA	-	-



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Pagu Anggaran (Rp)
		Nilai LAKIP / AKIP	Nilai	cc	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	38.581.800
		Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	100	-	-
		Prosentase tertib administrasi barang/ aset daerah	%	100	-	-
3.	Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah SDM (aparatur dan masyarakat) yang mengikuti pelatihan/bimtek berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Orang	288	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	107.221.600
4.	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga terkait dan media massa	Jumlah Informasi yang tersampaikan melalui berbagai media	Jenis	5	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1.891.620.800

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Rencana Kerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dilakukan Programa dan Kegiatan yg selaras dg pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :

- 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan didukung dengan 11 Kegiatan, yaitu :**
 - 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
 - 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
 - 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 10 Penyediaan Makan dan Minuman
 - 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan didukung dengan 4 Kegiatan, Yaitu :**
 - 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2 Pembangunan Gedung Kantor
 - 3 Pengadaan Mebeleur
 - 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan didukung dengan 1 Kegiatan, Yaitu :**
 - 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan didukung dengan 3 Kegiatan, Yaitu :**



- 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
- 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- 5 Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor dengan didukung dengan 1 Kegiatan, Yaitu :**
 - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor
- 6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa didukung dengan 4 Kegiatan, Yaitu :**
 - 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.
 - 2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi.
 - 3 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
- 7 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi dengan didukung dengan 1 Kegiatan, Yaitu :**
 - 1 Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
- 8 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dengan didukung dengan 1 Kegiatan, Yaitu :**
 - 1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
- 9 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa didukung dengan 2 Kegiatan, Yaitu :**
 - 1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 2 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat
- 10 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**
 - 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB



Hubungan IKU Diskominfo dengan IKU Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
Prosentase kantor pemerintah yang terhubung jaringan WAN	Prosentase kantor pemerintah yang terhubung jaringan WAN
Jumlah pelayanan publik berbasis IT	Jumlah pelayanan publik berbasis IT
Jumlah website instansi pemerintah daerah	Jumlah website instansi pemerintah daerah
Jumlah pelayanan publik bidang telekomunikasi dan persandian	
Jumlah dokumen (pedoman) operasional bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Jumlah dokumen data statistik	
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-
Nilai LAKIP / AKIP	
Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	
Prosentase tertib administrasi barang/ aset daerah	
Jumlah SDM (aparatur dan masyarakat) yang mengikuti pelatihan/bimtek berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Jumlah Informasi yang tersampaikan melalui berbagai media	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan

membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:.

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi/ Melampaui Target
2	= 100%	Sesuai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah menetapkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2017 sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (110,7%) melampaui target, 9 (sembilan) indikator Kinerja Utama sesuai target (100%) dan 2 (dua) tidak mencapai target sebesar (77,5% dan NA). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 3.1. TINGKAT CAPAIAN SASARAN

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian Sasaran					
			Melampaui Target (>100%)		Sesuai target (100%)		Belum mencapai target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	1	1	134,12				
2	Sasaran 2	9	1	300	6	100	2	77,5 / -
3	Sasaran 3	1			1	100		
4	Sasaran 4	1			1	100		
Jumlah		12	2		8		2	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang mempengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur adalah capaian indikator kinerja dengan parameter yang telah ditetapkan dalam lampiran yaitu target dan realisasi. Dari perbandingan antara target dan realisasi akan diketahui proporsi capaian pencapaian kinerja dalam bentuk prosentase.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON

No	Sasaran	IKU
1	S1. Tersedianya prasarana dan sarana komunikasi dan informatika	I.1. Prosentase kantor pemerintah yang terhubung jaringan WAN
2	S2. Terwujudnya pelayanan informasi dan telekomunikasi	I.1. Jumlah pelayanan publik berbasis IT I.2. Jumlah website instansi pemerintah daerah I.3. Jumlah penyelenggaraan bidang telekomunikasi dan persandian I.4. Jumlah dokumen (pedoman) operasional bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi I.5. Jumlah dokumen data statistik I.6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) I.7. Nilai LAKIP / AKIP I.8. Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan I.9. Prosentase tertib administrasi barang/ aset daerah
3	S3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi	I.1. Jumlah SDM (aparatur dan masyarakat) yang mengikuti pelatihan/bimtek berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
4	S4. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga terkait dan media massa	I.2. Jumlah Informasi yang tersampaikan melalui berbagai media

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Metode Evaluasi Kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan formulir penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan formulir pembiayaan dalam pencapaian Sasaran sebagaimana terlampir.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2019 maupun Renja Tahun 2017. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi

kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

- ✓ kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (2017)
- ✓ kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya (< 2017)
- ✓ Kinerja nyata dengan target akhir Renstra (2019)
- ✓ kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta
- ✓ kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 sasaran dan 12 indikator kinerja dari 4 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2014 - 2019, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Tersedianya prasarana dan sarana komunikasi dan informatika

Tolok ukur capaian sasaran 1 (satu) Tersedianya prasarana dan sarana komunikasi dan informatika terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator: Prosentase kantor pemerintah yang terhubung jaringan WAN.

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi target tahunan adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah kantor yang terhubung jaringan WAN}}{\text{Jumlah target tahunan kantor yang terhubung jaringan WAN}} \times 100 \%$$

Untuk membangun jaringan WAN, maka aktivitas yang dikerjakan adalah dengan membangun radio wireless. Radio wireless merupakan salah satu alternative media dalam jaringan telekomunikasi. Saat ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya jaringan internet untuk mengakses sistem informasi pemerintahan daerah di Kabupaten Cirebon.

Dari data yang diperoleh bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sampai tahun 2017 telah membangun radio wireless untuk 85 titik di lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pada pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 3.3. DATA PEMBANGUNAN RADIO WIRELESS DI KABUPATEN CIREBON

Tahun	Tingkat Capaian Pembangunan	Lokasi
2014	54 titik	- SKPD - 22 Kecamatan
2017	114 titik	- SKPD - Kecamatan - Desa/ Kelurahan

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan data diatas, capaian pembangunan radio wireless pada tahun awal perencanaan 2014 adalah 54 titik dan meliputi seluruh OPD, 22 kecamatan, atau sebesar 51,92 %. Dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 114 titik atau 109,62 % dari target Renstra.

TABEL 3.4 ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 1
TERSEDINYA PRASARANA DAN SARANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DARI TAHUN 014 DIBANDING TARGET RENSTRA TAHUN 2018

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2019	Capaian Realisasi 2017 Terhadap Target 2019
		Target %	Realisasi %	%	Target %	Realisasi %	%		%
1	Prosentase kantor pemerintah yang terhubung jaringan WAN	76	76	100	85	114	134,12	104	109,62

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Indikator kinerja Prosentase kantor pemerintah yang terhubung jaringan WAN. Indikator ini sangat penting sebagai sarana untuk kelancaran jaringan internet SKPD di lingkungan Kabupaten Cirebon. Dengan adanya jaringan internet maka proses administrasi pemerintahan yang bersifat online dapat berjalan dengan lancar.

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran "tersedianya prasarana dan sarana komunikasi dan informatika" adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Anggaran yang digunakan pada tahun 2017 untuk mewujudkan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa sebesar **Rp. 2.550.164.400** dengan realisasi sebesar **Rp 2.487.386.400** atau sebesar **97,54%**. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 1 Tersedianya Prasarana dan Sarana Komunikasi dan Informatika melalui perbandingan Prosentase Kantor Pemerintah yang Terhubung Jaringan WAN dengan prosentase penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



TABEL 3.5. ANALISIS EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN 1

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2017		%
			Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1	Prosentase kantor pemerintah yang terhubung jaringan WAN	%	85	114	134,12	2.550.164.400	2.487.386.400	97,54
	Prosentase Rata-rata capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1				134,12			97,54
	Tingkat Efisiensi				100 – 97,54 = 36,58			

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

TABEL 3.6. FAKTOR PENDUKUNG, PENGHAMBAT DAN REKOMENDASI PENCAPAIAN SASARAN 1

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rekomendasi
1. Adanya komitmen dan kebijakan serta dukungan dari pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat informasi	1. Terbatasnya anggaran membuat adanya pembatasan kegiatan agar tidak melebihi pagu anggaran 2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kinerja 3. Terbatasnya sumber daya manusia dalam pencapaian kinerja	1. Penambahan anggaran untuk meningkatkan pelayanan public berbasis IT 2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja 3. Pelatihan/kursus bagi aparatur dengan spesifikasi tertentu

Sumber : Hasil Pengolahan data, 2017

Sasaran 2

Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Telekomunikasi

Tolok ukur capaian sasaran 2 (dua) terwujudnya pelayanan informasi dan telekomunikasi. terwujudnya pelayanan informasi dan telekomunikasi terdiri dari 9 (sembilan) indikator yaitu indikator:

1. Jumlah pelayanan publik berbasis IT
2. Jumlah website instansi pemerintah
3. Jumlah pelayanan publik bidang telekomunikasi dan persandian
4. Jumlah dokumen (pedoman) operasional bidang teknologi informasi dan komunikasi
5. Jumlah dokumen data statistik
6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
7. Nilai LAKIP/ AKIP
8. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan
9. Prosentase tertib administrasi barang/aset daerah

JUMLAH PELAYANAN PUBLIK BERBASIS IT

Pencapaian sasaran 1 indikator 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

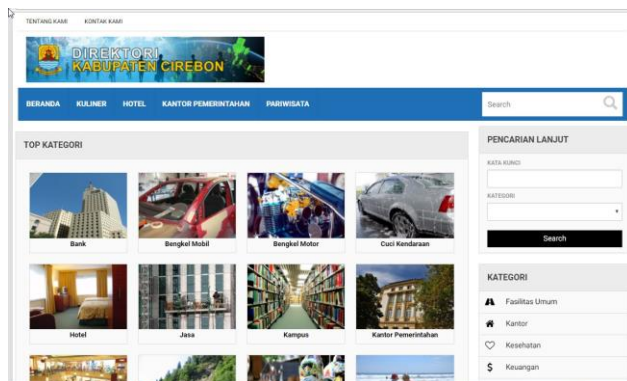
TABEL 3.7. DATA PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS IT

Tahun	Capaian Pelayanan Publik berbasis IT	Keterangan
2015	'6 jenis	1. Hotspot area publik 2. Pembangunan Sistem Informasi Pengaduan dan Keluhan (Si UPIK) 3. Aplikasi mail server 4. Co-location 5. Shared hosting 6. Domain
2016	'7 jenis	7 Aplikasi TV Cirebonkab 8 Aplikasi cirebon directory 9 IP Publik
2017	'12 jenis	10 Aplikasi Helpdesk 11 VPS (Virtual Privat Server) 12 Cloud Data Service

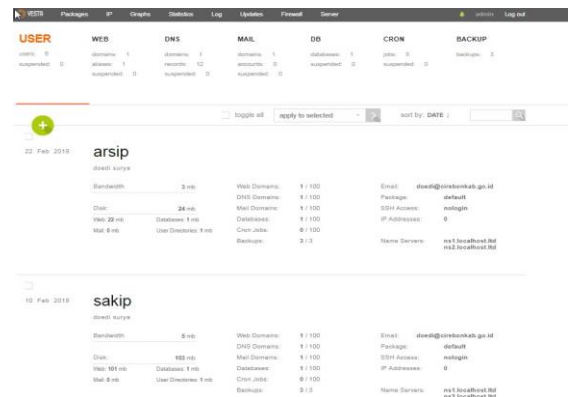


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

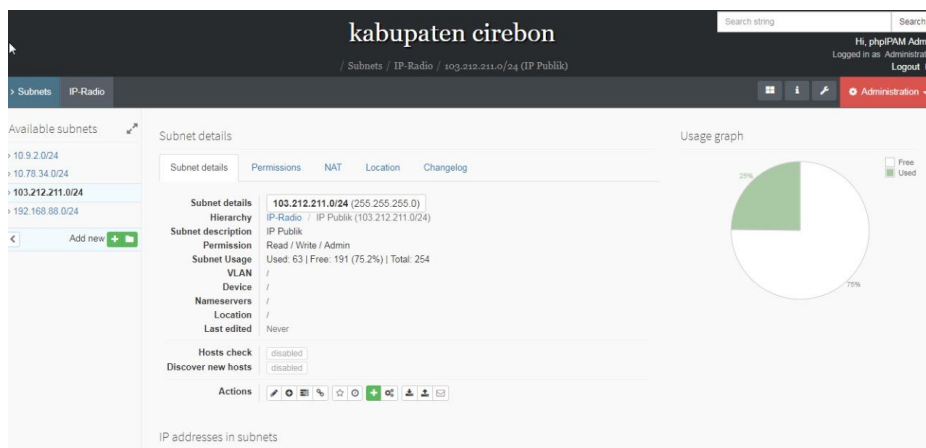
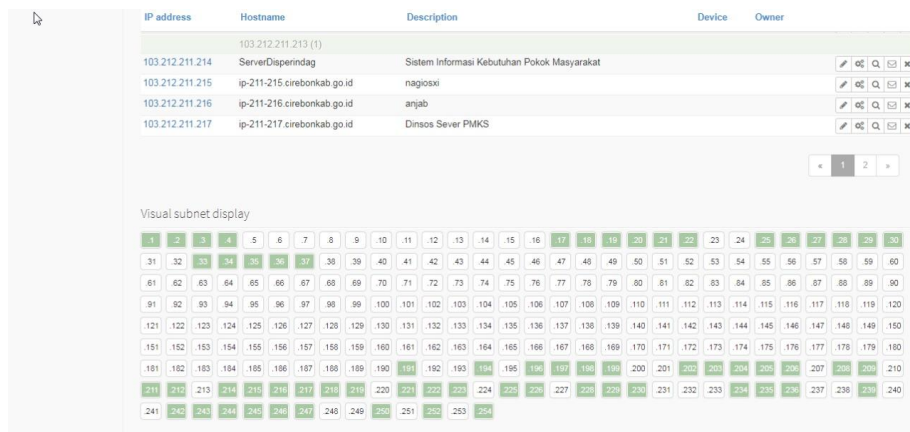
Directory Kabupaten Cirebon



Shared Hosting



IP Publik





tv. cirebonkab.go.id



VPS

Server View

Datacenter

VPS2

107 (Public-web2)

108 (Teleconveren

109 (Public-Web3)

local (VPS2)

local-lvm (VPS2)

kominfo

vps

100 (bappeda)

101 (surat)

102 (nas)

103 (publicweb)

104 (simaya)

105 (organisasi)

106 (bppt)

local (vps)

local-lvm (vps)

SKPD

Datacenter

Q Search

Summary

Options

Storage

Backup

Permissions

Users

Groups

Pools

Roles

Authentication

HA

Firewall

Type ↑

Description

Disk usage...

Memory us...

CPU usage

Uptime

node

VPS2

9.3 %

46.5 %

0.4% of 16...

30 days 22.3...

node

kominfo

-

node

vps

4.9 %

94.9 %

5.3% of 6C...

48 days 19.4...

pool

SKPD

51.5 %

0.5% of 40...

48 days 19.3...

qemu

107 (Public-web2)

76.9 %

0.3% of 4C...

30 days 15.1...

qemu

108 (Teleconverence)

91.9 %

9.6% of 8C...

30 days 15.1...

qemu

109 (Public-Web3)

84.0 %

0.2% of 8C...

30 days 15.1...

qemu

100 (bappeda)

5.0 %

0.2% of 4C...

24 days 09.5...

qemu

101 (surat)

36.6 %

0.6% of 6C...

48 days 19.3...

qemu

102 (nas)

-

qemu

103 (publicweb)

93.8 %

0.1% of 6C...

15 days 13.0...

qemu

104 (simaya)

93.6 %

2.3% of 4C...

48 days 19.2...

qemu

105 (organisasi)

22.1 %

0.2% of 4C...

48 days 19.2...

Berdasarkan data diatas, pelayanan publik berbasis IT pada tahun 2015 sebanyak 6 jenis. Pada tahun 2016 meningkat sebanyak 9 jenis dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 12 jenis.

Prosentase jumlah pelayanan publik berbasis IT berdasarkan target tahun 2017 adalah adalah 4 jenis atau 300%. Dengan demikian indikator tersebut melebihi target Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

JUMLAH WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pencapaian sasaran 1 indikator 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 3.8. DATA WEBSITE INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Tahun	Jumlah website	Keterangan
2014	18 website	1. www.diskominfo.cirebonkab.go.id 2. www.bkppd.cirebonkab.go.id 3. www.bappeda.cirebonkab.go.id 4. www.rsudwaled.cirebonkab.go.id 5. www.diskucapil.cirebonkab.go.id 6. www.dinkes.cirebonkab.go.id 7. www.bppt.cirebonkab.go.id 8. www.dishub.cirebonkab.go.id 9. www.perpusda.cirebonkab.go.id 10. www.disdik. cirebonkab.go.id 11. www.inspektorat.cirebonkab.go.id 12. www.arjawinangun.cirebonkab.go.id 13. www.plered.cirebonkab.go.id 14. www.gunungjatikec.cirebonkab.go.id 15. www.sumber.cirebonkab.go.id 16. www.kelurahanperbetulan.cirebonkab.go.id 17. www.dprd.cirebonkab.go.id 18. www.cirebonkab.go.id
2015	25 website	19. www.dinkopumkm.cirebonkab.go.id 20. www.blhd.cirebonkab.go.id 21. www.dinsos.cirebonkab.go.id 22. www.ciledug.cirebonkab.go.id 23. www.karangsembung.cirebonkab.go.id 24. www.talun.cirebonkab.go.id 25. www.setda.cirebonkab.go.id
2016	31 website	26. www.rsudarjawinangun.cirebonkab.go.id 27. www.disbudparpora.cirebonkab.go.id 28. www.bkp5k.cirebonkab.go.id 29. www.dcktr.cirebonkab.go.id 30. www.kearsipan.cirebonkab.go.id 31. www.tengahtani.cirebonkab.go.id
2017	31 website	-

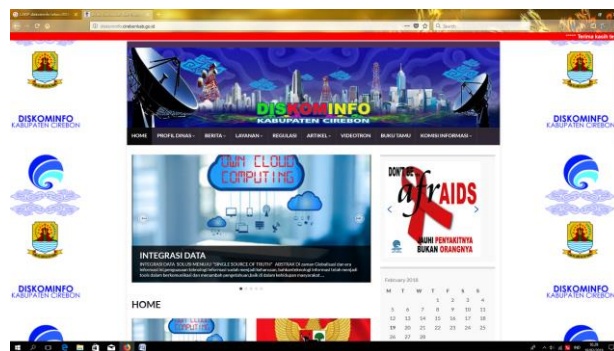
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan data diatas, bahwa website instansi pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2014 berjumlah 18 website, pada tahun 2015 menjadi 25 website, pada tahun 2016 menjadi sejumlah 31 dan pada tahun 2017 tidak melaksanakan kegiatan pembuatan website. Berikut sampel website pemerintah Kabupaten Cirebon.

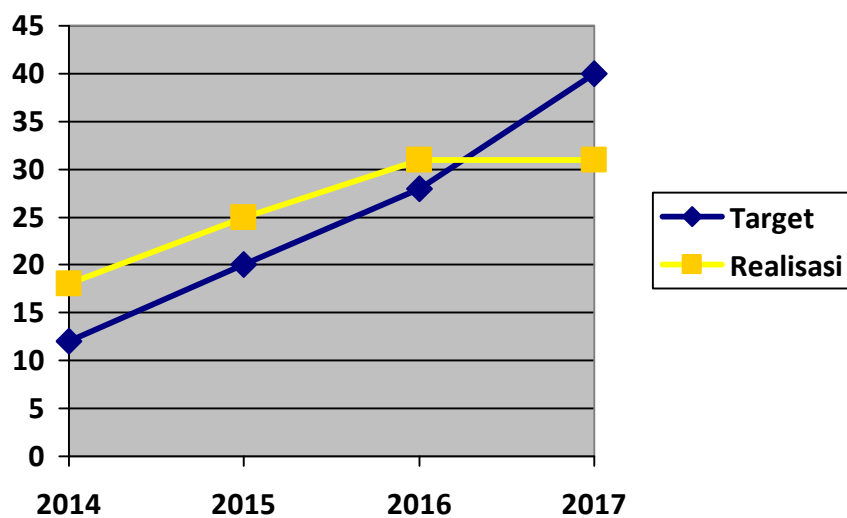
<http://cirebonkab.go.id/>



<http://diskominfo.cirebonkab.go.id/>



Gambar 2. CAPAIAN JUMLAH WEBSITE INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON



Dari gambar diatas bahwa indikator tersebut bahwa website instansi pemerintah di Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2017 adalah 31 website atau 77,50 % dari target Renstra (40 web). Hal ini disebabkan beberapa kendala diantaranya :

1. Tidak dialokasikannya anggaran mengenai pembuatan website
2. Terbatasnya SDM pengelola website SKPD
3. Kelemahan konten website SKPD, dalam hal informasi anggaran dan laporan keuangan serta informasi pelayanan

Solusi/pemecahan masalah yang dihadapi :

1. Menjadi skala prioritas pengalokasian anggaran untuk pembuatan website SKPD yang belum memiliki website
2. Mengadakan rakor dengan pengelola website SKPD untuk meningkatkan kompetensi pengelola website dan untuk meningkatkan kualitas website
3. Melakukan redesign website

JUMLAH PENYELENGGARAAN BIDANG TELEKOMUNIKASI DAN PERSANDIAN

Pencapaian sasaran 1 indikator 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 3.9. DATA PENYELENGGARAAN BIDANG TELEKOMUNIKASI DAN PERSANDIAN

Tahun	Penyelenggaraan Bidang Telekomunikasi dan Persandian
2016	<ul style="list-style-type: none">- Operasional Pengawasan menara telekomunikasi- Pemeliharaan jaringan dan alat-alat santel- Sosialisasi SOP retribusi menara telekomunikasi- Evaluasi dengan pengawas warnet di kecamatan
2017	<ul style="list-style-type: none">- Operasional Pengawasan menara telekomunikasi- Pendistribusian surat melalui jaringan santel- Sosialisasi SOP pengelolaan warnet- Evaluasi dengan pengawas warnet di kecamatan

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan data diatas, penyelenggaraan bidang telekomunikasi dan persandian terdiri dari 4 jenis, yang merupakan tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Adapun aktivitas pemeliharaan jaringan dan alat-alat santel adalah aktivitas yang baru dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 dikarenakan terdapat perubahan peraturan yaitu Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Kurangnya pemahaman pengelola atau pemilik usaha baik itu penyelenggara warnet ataupun menara telekomunikasi tentang regulasi atau kebijakan yang mengatur terhadap perilaku usahanya serta kecilnya tingkat kesadaran pengelola atau pemilik pengusaha tersebut untuk menerapkan sesuai aturan itu perlu dilaksanakan sosialisasi yang berkesinambungan tentang regulasi terkait hal-hal tersebut.
2. Terbatasnya SDM dalam pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi
3. Sarana dan prasarana sandi dan telekomunikasi yang belum memadai

Solusi/pemecahan masalah yang dihadapi :

1. Pentingnya untuk melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan tentang regulasi terkait warnet ataupun menara telekomunikasi.
2. Mengadakan pelatihan atau kursus untuk meningkatkan kompetensi bidang sandi dan telekomunikasi
3. Penyegaran sarana dan prasarana penunjang sandi dan telekomunikasi.

JUMLAH DOKUMEN (PEDOMAN) OPERASIONAL BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pencapaian sasaran 1 indikator 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 3.10. DATA DOKUMEN (PEDOMAN) OPERASIONAL BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Tahun	Dokumen Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Keterangan
2014	1 dokumen	- Kajian Penguatan Bandwidth
2015	1 dokumen	- Kajian blueprint pengembangan e-gov
2016	2 dokumen	- Kajian sistem informasi berbasis <i>Open Source System (OSS)</i> - Kajian naskah akademik rancangan perda penyelenggaraan tik di Kabupaten Cirebon
2017	3 dokumen	- Kajian standar operasional prosedur (SOP) sistem manajemen keamanan informasi menuju ISO/ IEC 20000 - Dokumen rekomendasi perencanaan dan pengembangan kebijakan TIK di Kab Cirebon - Dokumen kajian penerfapan kebijakan <i>e-office</i> di Kab Cirebon

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan data diatas, dokumen bidang teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2014 sebanyak 1 Dokumen, pada tahun 2015 sebanyak 1 Dokumen. Pada tahun 2016 sebanyak 2 dokumen. Dan pada tahun 2017 sebanyak 3 Dokumen sehingga total dokumen bidang teknologi informasi dan komunikasi sampai dengan 2017 adalah sejumlah 7 dokumen atau 46,67 % dari target renstra. Sehingga tidak memenuhi target. Adapun kendala yang dihadapinya adalah terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan kajian bidang teknologi informasi dan komunikasi.

JUMLAH DOKUMEN DATA STATISTIK

Pencapaian sasaran 1 indikator 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 3.11. DOKUMEN DATA STATISTIK

Tahun	Dokumen Data Statistik	Keterangan
2017	Dokumen PDRB Kecamatan	- 1 dokumen

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan data diatas, penyusunan data PDRB Kecamatan berjumlah 1 dokumen, yang merupakan bahan untuk perumusan kebijakan pembangunan. Adapun kegiatan ini adalah kegiatan yang baru dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 dikarenakan terdapat perubahan peraturan yaitu Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rapat Penyusunan PDRB Kecamatan



Rapat Penyusunan Buku Pedoman Pencacah





INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Pada tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon belum melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.

NILAI LAKIP

Pengukuran kinerja untuk ketercapaian sasaran 2 indikator 7 (Nilai LAKIP) diukur dengan nilai evaluasi LAKIP. Sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kinerja yang menjadi kewenangannya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu alat pimpinan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan efektif dan efisien. Dengan sistem AKIP, organisasi dituntut menyusun rencana jangka menengah beserta tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai, yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Untuk menjamin adanya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, diperlukan peran auditor, baik auditor internal yaitu Inspektorat Kabupaten Cirebon maupun auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh auditor pada prinsipnya adalah untuk mengatasi kelemahan dalam pengendalian intern dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

Sebagai wujud dari akuntabilitas keuangan, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Cirebon dituntut dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas untuk mendukung opini BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon DPPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Pada Tahun 2016 anggran Belanja Langsung sebesar 5.734.607.568,- sementara realisasinya sebesar Rp 5.536.739.563,- atau 96,55 %. Sedangkan pada Tahun

2017 dengan total nilai Belanja Langsung Rp. 7.765.233.900 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.459.311.983 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,06 %.

Untuk mengetahui perbandingan anggaran tahun 2016 dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.12. PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

No	Tahun	Anggaran (BL)	Realisasi	Prosentase
1	2016	5.734.607.568	5.536.739.563	96,55
2	2017	7.765.233.900	7.459.311.983	96,06

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

PROSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemeriksaan terhadap capaian kinerja dan keuangan Tahun 2017, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna memuaskan. Capaian kinerja ini berdasarkan pada Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti. dengan keseluruhan temuan telah ditindaklanjuti. Dengan capaian yang baik pada tahun 2017 ini, ke depannya realisasi kinerja tindak lanjut temuan pengelolaan anggaran, perlu dipertahankan dan perlu diupayakan agar tidak terjadi penurunan. Program yang mendukung pencapaian Sasaran 2 indikator 8 adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Untuk mengetahui Indikator tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti setiap adanya temuan baik dari Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat atau yang lainnya segera harus diselesaikan dengan waktu secepatnya tidak melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan.

PROSENTASE TERTIB ADMINISTRASI BARANG/ ASET DAERAH

Untuk mendukung pengelolaan asset daerah secara efisien dan efektif, serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan asset daerah, maka perluy memiliki atau

mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan dalam penyusunan APBD dan untuk memperoleh informasi manajemen asset daerah yang memadai diperlukan dasar pengelolaan kekayaan asset yang memadai juga.

Adapun lingkup administrasi barang/ asset daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2017 diantaranya :

No	Aset	Keterangan
1	Daftar mutasi barang	√
2	Daftar pengadaan	√
3	Kib A – F	√
4	Aset Rusak Berat	√
5	Aset Non Kapitalisasi	√
6	Aset Tidak Berwujud	√
7	Buku Inventaris	√
8	Kartu Inventaris Ruangan (KIR)	√
9	Input Modul Aset	√
10	Input Modul Pengadaan	√
11	BA Rekon Aset	√
12	RKBMD	√

Berdasarkan tabel diatas, pengelolaan administrasi asset daerah yang terdiri dari 12 indikator pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2017 dapat terpenuhi atau 100 %.

Dari 12 indikator yang telah dijelaskan diatas, dapat rinci analisis pencapaian sasaran 2 pada tabel berikut ini.

TABEL 3.13. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 2
TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2019	Capaian Realisasi 2017 Terhadap Target 2019
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		%
1	Jumlah pelayanan publik berbasis IT	4	9	225	4	12	300	5	240
2	Jumlah website instansi pemerintah daerah	28	31	110,7	40	31	77,5	73	42,47
3	Jumlah penyelenggaraan bidang telekomunikasi dan persandian	4	4	100	4	4	100	5	80
4	Jumlah dokumen (pedoman) operasional bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	100	3	3	100	15	46,67
5	Jumlah dokumen data statistik	-	-	-	1	1	100	7	14,29
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Nilai LAKIP / AKIP	Cc	Cc	100	cc	Cc	100	b	100
8	Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Prosentase tertib administrasi barang/ aset daerah	100	100	100	100	100	100	100	100

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran "Terwujudnya pelayanan informasi dan telekomunikasi" adalah

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3. Program Pengkajian dan Penelitian bidang Komunikasi dan Informasi
4. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Anggaran yang digunakan pada tahun 2017 untuk mewujudkan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 38.581.800 dengan realisasi Rp. 38.581.800 atau sebesar 100 %. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. sebesar Rp. 2.550.164.400 dengan realisasi sebesar Rp 2.487.386.400 atau sebesar 97,54%. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi sebesar Rp. 53.995.000 dengan realisasi Rp. 53.820.000 atau sebesar 99,68 %. Dan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah sebesar 239.885.100 dengan realisasi Rp. 239.885.100 atau sebesar 100%. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 2 Terwujudnya pelayanan informasi dan telekomunikasi dengan prosentase penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.14. ANALISIS EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN 2
TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Jumlah pelayanan publik berbasis IT	jenis	4	12	300	2.550.164.400	2.487.386.400	97,54
Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran 1 indikator 1						% penyerapan anggaran		
Tingkat efisiensi					300 – 97,54 = 202,46			

TABEL 3.15. ANALISIS EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN 2
TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2	Jumlah website instansi pemerintah daerah	Website	40	31	77,5	-	-	-
Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran 1 indikator 2						%penyerapan anggaran		
Tingkat efisiensi					77,5 – 0 = 77,5			

TABEL 3.16. ANALISIS EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN 2
TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
3	Jumlah penyelenggaraan bidang telekomunikasi dan persandian	Jenis	4	4	100	2.550.164.400	2.487.386.400	97,54
Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran 1 indikator 3						%penyerapan anggaran		
Tingkat efisiensi					100 – 97,54 = 2,46			

TABEL 3.17. ANALISIS EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN 2
TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
4	Jumlah dokumen (pedoman) operasional bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dok	3	3	100	2.604.159.400	2.541.206.400	97,58
Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran 1 indikator 4						%penyerapan anggaran		
Tingkat efisiensi					100 – 97,58 = 2,42			

TABEL 3.18 . ANALISIS EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN 2
TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5	Jumlah dokumen data statistik	Dok	1	1	100	239.885.100	239.885.100	100
Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran 1 indikator 5						%penyerapan anggaran		
Tingkat efisiensi					100 – 100 = 0			



TABEL 3.19. ANALISIS EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN 2
TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	-	-	-	-	-	-
Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran 1 indikator 6						%penyerapan anggaran		
Tingkat efisiensi						-		

TABEL 3.20. ANALISIS EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN 2
TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
7	Nilai LAKIP	Niai	cc		100	17.942.000	17.942.000	100
Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran 1 indikator 7						%penyerapan anggaran		
Tingkat efisiensi						100 – 100 = 0		

TABEL 3.21. ANALISIS EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN 2
TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
8	Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persen	100	100	100	38.581.800	38.581.800	100
Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran 1 indikator 8						%penyerapan anggaran		
Tingkat efisiensi						100 – 100 = 0		

TABEL 3.22. ANALISIS EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN 2
TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
9	Prosentase tertib administrasi barang/ aset daerah	Persen	100	100	100	38.581.800	38.581.800	-
Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran 1 indikator 9						%penyerapan anggaran		
Tingkat efisiensi					100 – 0 =100			

Adapun untuk meningkatkan pelayanan informasi dan telekomunikasi adalah adanya faktor-faktor diantaranya :

TABEL 3. 23
FAKTOR PENDUKUNG, PENGHAMBAT DAN REKOMENDASI PENCAPAIAN SASARAN 2

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rekomendasi
1. Adanya komitmen dan kebijakan serta dukungan dari pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat informasi 2. Adanya SOP berkaitan pengelolaan warnet dan menara telekomunikasi	1. Terbatasnya anggaran membuat adanya pembatasan kegiatan agar tidak melebihi pagu anggaran 2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kinerja 3. Terbatasnya sumber daya manusia dalam pencapaian kinerja 4. Adanya perubahan regulasi	1. Penambahan anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis IT terutama indikator yang belum mencapai target 2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja 3. Pelatihan/kursus bagi aparatur dengan spesifikasi tertentu 4. Memberikan secara kontinyu bimbingan teknis berkaitan pengelolaan website terhadap SKPD

Sumber : Hasil Pengolahan data, 2017

Sasaran 3

Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Pada pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

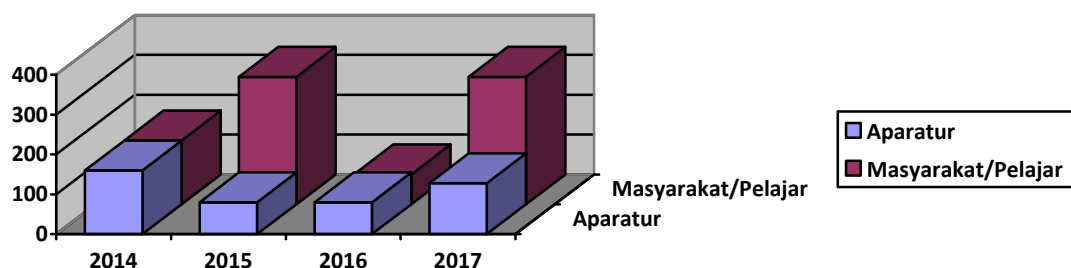
TABEL 3.24. DATA SDM (APARATUR/ MASYARAKAT) YANG MENGIKUTI PELATIHAN/ BIMTEK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Tahun	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Keterangan
2014	- Pelatihan TIK dan Internet Sehat Aman (INSAN)	- 160 orang	- Masyarakat
	- Pelatihan operator website	- 160 orang	- Aparatur
2015	- Pelatihan Operator Jaringan WAN	- 80 orang	- Aparatur
	- Pelatihan Jurnalistik dan Multimedia	- 320 orang	- Pelajar
2016	- Sosialisasi TIK dan Internet Sehat Aman (INSAN)	- 75 orang	- Masyarakat
	- Bimtek Operator Jaringan WAN	- 80 orang	- Aparatur
2017	- Sosialisasi TIK dan Internet Sehat Aman (INSAN)	- 160 orang	- Masyarakat
	- Bimtek computer dan internet di 3 kecamatan	- 80 orang	- Aparatur
	- Bimtek operator website dan webmail	- 48 orang	- Aparatur
	- Pelatihan jurnalistik dan multimedia	- 160 orang	- Pelajar

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon

GAMBAR 3.3

SDM YANG MENGIKUTI PELATIHAN/ BIMTEK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN 2014 – 2017



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan data diatas, data SDM (Aparatur/ Masyarakat) yang Mengikuti Pelatihan/ Bimtek Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2014 adalah 320 orang terdiri dari 160 dari aparatur dan 160 dari masyarakat/pelajar. Pada tahun 2015 sebanyak 80 dari aparatur dan 320 dari unsur masyarakat/pelajar. Pada tahun 2016 sebanyak 155 orang terdiri dari 80 unsur aparatur dan 75 unsur masyarakat/pelajar. Dan pada tahun 2017 sebanyak 288 orang yang terdiri dari 128 dari unsur aparatur dan 320 dari unsur masyarakat/pelajar sehingga jumlah SDM yang mengikuti pelatihan/ bimtek berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sampai dengan Tahun 2017 berjumlah 1.323 orang.

TABEL 3.25. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 3

TERSEDIAANYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DARI TAHUN 2016 DIBANDING DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Tahun 2019	Capaian realisasi s.d tahun 2017 terhadap target 2019
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		%
1	Jumlah SDM (aparatur dan masyarakat) yang mengikuti pelatihan/bimtek berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Orang	155	155	100	448	448	100	2.285	57.89

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Indikator kinerja Jumlah SDM (aparatur dan masyarakat) yang mengikuti pelatihan/bimtek berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Indikator ini merupakan upaya meningkatkan keterampilan/keahlian di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Dengan adanya pelatihan /sosialisasi /bimtek diharapkan akan mendapatkan SDM yang handal dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Cirebon.

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.



Anggaran yang digunakan pada tahun 2017 untuk mewujudkan Program Fasilitasi Peningkatan dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi sebesar **Rp. 107.221.600** dengan realisasi sebesar **Rp 107.221.600** atau sebesar **100%**. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 3 Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui perbandingan Jumlah SDM (aparatur dan masyarakat) yang mengikuti pelatihan/bimtek berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan prosentase penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.26 ANALISIS EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN 3
TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2017		%
			Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1	Jumlah SDM (aparatur dan masyarakat) yang mengikuti pelatihan/bimtek berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	288	288	100	107.221.600	107.221.600	100
	Prosentase Rata-rata capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 1				100			100
	Tingkat Efisiensi				100 – 100 = 0			

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

TABEL 3.27
FAKTOR PENDUKUNG, PENGHAMBAT DAN REKOMENDASI PENCAPAIAN SASARAN 3

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rekomendasi
1. Adanya komitmen dan kebijakan serta dukungan dari pemda dalam mewujudkan masyarakat informasi	1. Terbatasnya anggaran membuat adanya pembatasan kegiatan agar tidak melebihi pagu anggaran	1. Penambahan anggaran untuk kegiatan pelatihan/bimtek/ sosialisasi TIK
2. Tersedianya tenaga Instruktur bidang kerja Kominfo	2. Budaya kerja dan penguasaan teknologi komunikasi masih rendah	

Sumber : Hasil Pengolahan data, 2017

Sasaran 4

Terwujudnya kerjasama dengan lembaga terkait dan media massa

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 3.28.. DATA INFORMASI YANG TERSAMPAIKAN MELALUI BERBAGAI MEDIA

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi melalui				
		a) Media Massa (majalah, radio, televisi)	30 kali	20 kali	18 kali	22 kali
		b) Media baru sepeserti website (media online)	200 berita	200 berita	200 berita	200 berita
		c) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	5 kali	13 kali	8 kali	6 kali
		d) Media interpersonal seperti pertemuan forum komunitas	9 kali	6 kali	3 kali	4 kali
		e) Media luar ruang seperti leaflet, booklet, spanduk, Wawar keliling, pemutaran film dan videotron	105 kali	72 kali	75 kali	58 kali
2	Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	16 kec	16 kec	24 kec	24 kec

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

TABEL 2.29. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 4. TERWUJUDNYA KERJASAMA DENGAN LEMBAGA TERKAIT DAN MEDIA MASSA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Informasi yang tersampaikan melalui berbagai media	media	5	5	100	5	5	100	5	-	-

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Indikator kinerja Informasi yang tersampaikan melalui berbagai media pada Tahun 2017 tercapai sesuai target. Jumlah Informasi yang tersampaikan melalui berbagai media ini sangat penting sebagai alat untuk penyebarluasan informasi pemerintahan daerah. Pada Tahun 2016 diperoleh hasil capaian kinerja 100% sedangkan pada tahun 2019 akhir renstra ditargetkan 5 media untuk penyebarluasan informasi. Jenis media dalam penyebarluasan informasi pada tahun 2017 adalah :

1. Media Massa

Merupakan kegiatan penyebarluasan informasi meliputi penyebarluasan informasi melalui televisi sebanyak 6 kali siaran, radio sebanyak 6 kali siaran dan majalah Paseban sebanyak 6 kali terbit.

2. Media Baru

Merupakan kegiatan penyebarluasan informasi yang merilis berita berkaitan pemerintahan daerah yang dimuat di website pemerintah Kabupaten Cirebon sebanyak 200 berita.

3. Media Tradisional

Merupakan kegiatan penyebarluasan informasi melalui pertunjukkan rakyat tradisional sebanyak 6 kali pertunjukan.

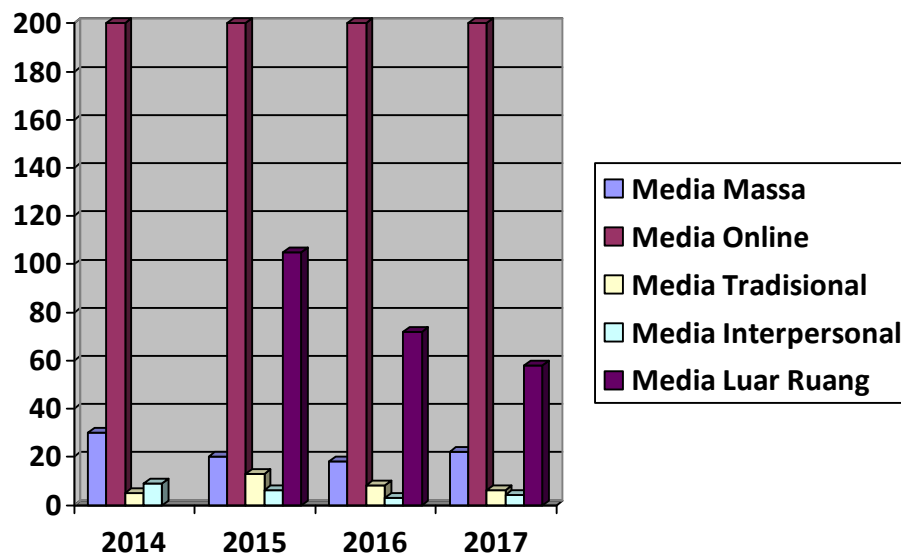
4. Media Interpersonal

Merupakan kegiatan berupa sosialisasi/ pembinaan yang berkaitan dengan lembaga atau forum komunikasi di Kabupaten Cirebon sebanyak 4 kali kegiatan.

5. Media Luar Ruang

Merupakan kegiatan yang meliputi wawar keliling sebanyak 52 kali dan pemutaran film 6 kali kegiatan.

Untuk mengetahuinya dapat dilihat dalam dalam gambar dibawah ini :



Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran Terwujudnya kerjasama dengan lembaga terkait dan media massa yaitu program kerjasama informasi dan media massa.

Anggaran yang digunakan pada tahun 2017 untuk mewujudkan Program Kerjasama Informasi dan Media Massa sebesar **Rp. 1.891.620.800** dengan realisasi sebesar **Rp 1.764.246.400** atau sebesar **93,27%**. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 4 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga terkait dan media massa melalui perbandingan Jumlah Informasi yang tersampaikan melalui berbagai media dengan prosentase penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.30 ANALISIS EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN 4

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2017		%
			Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1	Jumlah Informasi yang tersampaikan melalui berbagai media	jenis	5	5	100	1.891.620.800	1.764.246.400	93,27
	Prosentase Rata-rata capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1				100			93,27
	Tingkat Efisiensi				100 – 93,27 = 6,73			

Sumber : Hasil Pegolahan Data, 2017

TABEL 3.31

FAKTOR PENDUKUNG, PENGHAMBAT DAN REKOMENDASI PENCAPAIAN SASARAN 4

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rekomendasi
1. Tumbuhnya motivasi dengan didapatnya 2 penghargaan atas kinerja mitra SKPD	1. SPM sesuai Permenkominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 memiliki target pertunjukkan rakyat yang cukup sulit untuk direalisasikan karena terkendala anggaran; 2. Terbatasnya anggaran membuat adanya pembatasan kegiatan agar tidak melebihi pagu anggaran;	1. adanya penambahan anggaran pada program/ kegiatan pemenuhan SPM

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

3.3 Prestasi-Prestasi

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Juara 3 Tingkat Provinsi	Kelompok Seni Pertunjukan Rakyat "Kominfo Awards 2017"	2017
2	Pemenang Tingkat Provinsi	Program siaran terbaik kategori program ILM radio komunitas dengan judul "kekerasan dalam rumah tangga"	2017
3	Juara II tingkat Kabupaten	Penilaian Manajemen Kepegawaian yang Santun, Inovatif, Akuntabel, & Profesional (SIAP) Klaster I Tingkast Kabupaten Cirebon	2017

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, 2017

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2017. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 12 (duabelas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 134,12% atau melebihi/melampaui target.
2. Sasaran 2 terdiri dari 9 indikator dengan nilai rata-rata 108,61% atau melebihi/melampaui target.
3. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau sesuai target.
4. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau sesuai target.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target dan melampaui target. Dalam Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin



dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Belanja Langsung Kabupaten Cirebon DPA Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 7.765.233.900,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.459.311.983,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,06%.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon 2014-2019 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja pada tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017, dengan rincian pencapaian sasaran terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 109,62% atau melebihi/melampaui target.
2. Sasaran 2 terdiri dari 9 indikator dengan nilai rata-rata 80,38% atau tidak mencapai target.
3. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 57,83% atau tidak mencapai target.
4. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau sesuai target.

Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Cirebon.

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**

SUGENG DARSONO, SH., MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19620718 198603 1 003